

PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG PENDIDIKAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2001, nilai Indeks Pembangunan Gender (*Gender-related Development Index, GDI*) Indonesia menempati urutan ke-91 dari 144 negara. Dengan hal ini berarti ketidaksetaraan gender di berbagai bidang pembangunan masih merupakan masalah yang dihadapi Indonesia pada masa mendatang. Dalam bidang pendidikan, walaupun kebijakan pendidikan di Indonesia tidak membedakan akses menurut jenis kelamin, dalam kenyataannya perempuan masih tertinggal dalam menikmati kesempatan belajar. Sebagai contoh, pada tahun 1980, hanya 63% penduduk perempuan yang melek huruf, sementara laki-laki 80%. Sepuluh tahun kemudian persentase melek huruf untuk perempuan meningkat menjadi 79% dan laki-laki 90%. Pada tahun 1998, kesenjangan melek huruf antara laki-laki dan perempuan semakin mengecil, yaitu laki-laki 93,40% dan perempuan 85,50%. Namun jika dilihat dari jumlahnya, masih terdapat 11,7 juta perempuan yang buta huruf dibandingkan dengan 5,2 juta laki-laki.

Perbedaan partisipasi antara perempuan dan laki-laki juga dapat dilihat menurut jenjang pendidikan. Sensus Penduduk 1990 menunjukkan bahwa ada 32% laki-laki lulusan Sekolah Dasar(SD), sementara perempuan lulusan SD hanya 28%. Pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), terdapat sekitar 12% laki-laki lulusan SLTP dan hanya 9% perempuan lulusan SLTP. Pada tingkat Sekolah Menengah (SM), terdapat 12% laki-laki lulusan SM, sementara perempuan lulusan SM hanya 8%. Pada jenjang perguruan tinggi (PT), ada 2% laki-laki lulusan PT dan hanya 1% perempuan lulusan PT (Biro Pusat Statistik, 1992). Pada tahun 1999

terjadi perubahan. Penduduk perempuan yang berhasil menamatkan SD sudah mencapai 33,40%, sementara penduduk laki-laki yang lulus SD hanya 32,50%. Perempuan yang berpendidikan SLTP 13,00%, sedikit lebih rendah dari laki-laki yang berpendidikan sama, yaitu 15,00%. Penduduk perempuan yang berpendidikan SM sebesar 11,40%, lebih rendah dari penduduk laki-laki yang berpendidikan sama yaitu 15,70%. Sementara itu, penduduk perempuan berpendidikan sarjana sudah mencapai 2,19%, tapi masih lebih rendah dibanding laki-laki yang berpendidikan sama yaitu 3,20%.

Ketidaksetaraan gender juga terlihat dari angka partisipasi berdasarkan kelompok usia maupun jenjang pendidikan. Pada tahun 1991, Angka Partisipasi Murni (APM) laki-laki adalah 84%, sedikit lebih tinggi dari APM perempuan yang 83 %. Pada tahun 1997, APM perempuan di tingkat SD adalah 92%, lebih rendah dari APM laki-laki yang 97,10% (Pusat Informasi Depdiknas, 1998). Pada tahun 1997, APM laki-laki di SLTP adalah 57,11%, sedangkan APM perempuan 54,70%. Di tingkat SM, APM laki-laki 30,20%, sedangkan APM perempuan 29,80%.

Fenomena ketimpangan gender dalam bidang pendidikan dalam masyarakat Indonesia memang masih sangat kuat. Dalam banyak keluarga, anak perempuan tidak menjadi prioritas untuk melanjutkan pendidikan. Pada sekolah kejuruan, ada stereotip bahwa siswa perempuan tidak cocok dengan sekolah kejuruan teknologi. Pada perguruan tinggi, mahasiswa perempuan dipandang lebih cocok dengan ilmu-ilmu lembut, seperti ilmu-ilmu sosial, ekonomi, sastra; dan kurang cocok dengan teknologi. Demikian pula jumlah tenaga pendidik perempuan lebih banyak pada sekolah dasar dan semakin berkurang pada sekolah atau perguruan tinggi.

Permasalahan gender dalam bidang pendidikan di Indonesia tampak terutama dalam aspek-aspek pemerataan pendidikan, pengelolaan pendidikan dan sumber daya manusianya, kurikulum, bahan ajar, proses pembelajaran, dan program studi serta penjurusan. Jelas terdapat sejumlah faktor yang menimbulkan kesenjangan gender dalam praktek pendidikan yang relatif tidak berubah sejak awal tahun 1970-an. Salah satu faktor utama adalah faktor sosial budaya yang sangat sulit diubah dalam waktu yang singkat. Padahal, hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam bidang pendidikan memberikan dampak yang signifikan terhadap kemajuan pembangunan sektoral serta peningkatan produktivitas secara keseluruhan.

Oleh karena itu pengarusutamaan gender dalam bidang pendidikan merupakan sesuatu yang sangat urgen. Komitmen untuk melaksanakan pengarusutamaan gender dalam bidang pendidikan ini sangat kuat, karena ia didasarkan pada amandemen UUD 1945, Ketetapan MPR, GBHN, Program Pembangunan Nasional, Instruksi Presiden, dan Keputusan Dirjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Depdiknas tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan.

B. Pendidikan dalam Perspektif Keadilan dan Kesetaraan Gender

Dalam *International Convention of Population and Development (ICPD)* , Cairo, isu kemiskinan (*poverty issues*) dunia mendapat sorotan yang luas. Proporsi perempuan miskin dunia berkorelasi searah dengan keterbelakangan pendidikan mereka. Tiga perempat dari penduduk buta huruf dunia adalah perempuan, dan dua pertiga penduduk buta huruf tersebut berada di Asia. Masalah ini mendapat sorotan tajam dari berbagai kajian empiris yang puncaknya berupa *World Summit on Social*

Development (WSSD), terutama menyangkut masalah keterbelakangan penduduk minoritas, termasuk di dalamnya segmen perempuan.

Gejala kesenjangan gender dalam bidang pendidikan terjadi lebih buruk di negara-negara berkembang. Kesenjangan terjadi antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses lembaga-lembaga pendidikan, sekolah atau pendidikan luar sekolah. Kesenjangan dalam akses menyebabkan rendahnya partisipasi perempuan dalam mengikuti berbagai jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Lebih dari itu, perempuan belum mampu memainkan peran yang seimbang dengan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan di bidang pendidikan, naik melalui lembaga-lembaga resmi maupun melalui keluarga.

Akibat kesenjangan gender dalam bidang pendidikan, perempuan yang merupakan setengah penduduk dunia masih merupakan segmen masyarakat yang belum diberdayakan sehingga kurang produktif. Kesenjangan gender dalam bidang pendidikan dianggap pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia yang perlu dieleminasi melalui upaya-upaya yang sistematis dan terprogram. Oleh karena itu setiap negara, termasuk Indonesia, telah menetapkan komitmennya untuk menghilangkan atau mengurangi kesenjangan gender dalam bidang pendidikan. Komitmen tersebut dipertegas dalam Kesepakatan Dakar dalam bentuk saran-saran kuantitatif yang harus dicapai dalam suatu kurun waktu tertentu oleh setiap negara agar tercapai kesetaraan gender pada semua jenis dan jenjang pendidikan.

Profil gender dalam bidang pendidikan di Indonesia tampak pada pokok-pokok pemerataan kesempatan belajar, gender dalam kurikulum dan proses pembelajaran dan program penjurusan studi sebagaimana terurai berikut.

1. Pemerataan Kesempatan Belajar (Gender Equity)

Salah satu strategi untuk mencapai tujuan nasional sesuai dengan amanat UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, adalah dengan menyediakan kesempatan belajar bagi seluruh penduduknya tanpa kecuali. UUD 1945 menjamin hak-hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, seperti yang ditegaskan dalam ayat 1 Pasal 31 UUD 1945 bahwa setiap warganegara berhak untuk memperoleh pendidikan. Prioritas pembangunan pendidikan menegaskan pentingnya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi setiap warga Negara, yang dapat diwujudkan melalui proses seleksi masuk ke setiap program pendidikan dengan tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku bangsa, dan status Sosial-ekonomi.

Berdasarkan Undang-undang maupun peraturan pemerintah secara resmi tidak diciptakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan untuk mengakses lembaga-lembaga pendidikan. Namun ada kecenderungan umum bahwa kaum perempuan masih tertinggal dibandingkan dengan kaum laki-laki dalam memperoleh kesempatan pendidikan atau menikmati hasil pembangunan pendidikan, walaupun dalam perkembangannya keadaan tersebut makin membaik. Beberapa data berikut dapat membantu menjelaskan mengenai fenomena tersebut.

Untuk penduduk buta huruf; pada tahun 1998, secara nasional (Kota & Desa) terdapat 6,77% laki-laki buta huruf, dan menjadi 5,84% pada tahun 2003. Sementara pada kurun waktu yang sama, semula terdapat 14,43% menjadi 12,28%. Perkembangan penurunan jumlah penduduk buta huruf tersebut lebih besar terjadi pada perempuan (laki-laki 0,19% per tahun, perempuan 0,43% per tahun), yang artinya perkembangan melek huruf perempuan lebih baik.

Bila dibandingkan antara Kota dan Desa, keadaannya sama dengan keadaannya nasionalnya, yaitu bahwa baik di Kota maupun di Desa,

perempuan mengalami perkembangan melek huruf yang lebih baik dari pada laki-laki. Di Kota, pertumbuhan berkurangnya penduduk laki-laki buta huruf 0,03% per tahun, perempuan 0,10% per tahun; di Desa, pertumbuhan berkurangnya penduduk laki-laki buta huruf 0,20% per tahun, perempuan 0,52% per tahun. Selain itu, data tersebut juga menunjukkan masih adanya ketimpangan jumlah penduduk buta huruf antara laki-laki dan perempuan, baik di desa maupun di kota.

Grafik 2.1 Persentase Penduduk Buta Huruf menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 1998-2003

Pada data mengenai komposisi penduduk 10 tahun ke atas berdasarkan jenis kelamin dan status pendidikan, disparitas gender juga masih terjadi (Lihat Tabel 2.1). Pada kelompok penduduk yang "Tidak/Belum Pernah Bersekolah"; ketimpangan antara laki-laki dan perempuan sangat menonjol, jauh lebih menonjol dari pada ketimpangan yang terjadi pada kelompok penduduk yang "Masih Bersekolah". Ini berarti laki-laki telah memperoleh kesempatan bersekolah lebih baik dari pada perempuan. Pada kelompok penduduk yang "Tidak Bersekolah Lagi", disparitas gender juga masih cukup mencolok sejak 1998 hingga 2003. Jika kita menilai lebih jauh bagaimana kecenderungan yang terjadi selama 6 tahun terakhir itu, maka rata-rata terjadi penurunan penduduk laki-laki maupun perempuan yang tergolong "Tidak/Belum Pernah Bersekolah", dan yang masih bersekolah di "SD/MI", "SLTP/ MTs", serta "SMU/SM".

Apabila penurunan penduduk yang "Tidak/Belum Pernah Bersekolah" itu disertai dengan kenaikan penduduk yang masih bersekolah, maka ini merupakan hal yang sangat baik, tetapi kenyataannya menunjukkan sebaliknya. Hal ini mungkin disebabkan oleh dampak krisis ekonomi /politik yang berkepanjangan sejak 1997. Yang menarik justru pada

penduduk yang masih bersekolah kelompok "Dip-I s/d Univ", karena sejak tahun 1998 kecenderungannya tidak berubah (pada laki-laki) dan bahkan rata-rata naik (pada perempuan). Jadi kondisi perempuan lebih baik dari pada laki-laki dalam akses ke perguruan tinggi.

Grafik 2.2 Persentase Penduduk Umur 10 Th Ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Status Pendidikan, Tahun 1998-2003

Pendidikan penduduk ini berakibat terhadap struktur angkatan kerja menurut pendidikan baik pada laki-laki maupun perempuan. Komposisi pekerja/buruh/karyawan perempuan rata-rata hanya dua pertiganya. Grafik 2.3 dan Tabel 2.3 Lampiran menunjukkan kecenderungan yang cukup konsisten mengenai ketimpangan tersebut. Ada anggapan umum masyarakat yang masih berkembang selama ini bahwa laki-laki lebih dipersiapkan untuk menjalankan fungsi mereka sebagai penopang ekonomi keluarga, dan perempuan berfungsi mendukung laki-laki dalam urusan-urusan rumah tangga.

Grafik 2.3 Pekerja/Buruh/Karyawan/ Menurut Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin tahun 2002

Rendahnya proporsi pekerja perempuan menurut pendidikan dapat menunjukkan pula rendahnya tingkat partisipasi pendidikan kaum perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Keadaan ini diharapkan dapat diatasi dengan program wajib belajar yang telah dicanangkan pemerintah dalam jangka panjang, serta program pengarusutamaan gender. Kecenderungan yang tidak berbeda tergambar pula dari struktur pendidikan para PNS seperti terlihat pada Grafik 2.4 dan Tabel 2.4 Lampiran. Rendahnya tingkat pendidikan bagi penduduk perempuan, jelas mengurangi peluang bagi perempuan untuk menduduki jabatan atau kedudukan yang lebih tinggi yang ditentukan menurut pendidikan. Sebagai gambaran perempuan yang menjadi pegawai negeri sipil hanya berkelompok pada pegawai pada pendidikan SLTP, SLTA dan Diploma, dan pegawai perempuan yang sudah mencapai kesetaraan gender hanya pegawai negeri sipil berpendidikan 01/02 yaitu, 43,9% laki-laki dan 56,1% perempuan. Kecenderungan yang terjadi adalah pada PNS berpendidikan rendah proporsi perempuan juga rendah yaitu hanya 5,4% PNS perempuan yang berpendidikan SD, demikian juga sejak tingkat DIII/Sarmud, semakin tinggi tingkat pendidikan, proporsi PNS perempuan juga semakin kecil.

Grafik 2.4 Komposisi Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin pada Seluruh Lembaga Departemen dan Non Departemen Tahun 2003

Program perluasan dan pemerataan kesempatan belajar pendidikan dasar di Indonesia telah dilakukan sejak awal tahun 1970-an yang dituangkan dalam pencanangan Program Wajib Belajar Sekolah Dasar (SD) pada tahun 1984 dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SL TP) pada tahun 1994. Program wajib belajar tersebut di samping telah memperluas kesempatan untuk belajar di SD dan SLTP, juga telah mendorong perluasan kesempatan belajar pada jenjang-jenjang pendidikan di atasnya. Dalam kebijakan pembangunan pendidikan tersebut, tidak pernah dibedakan antara kesempatan pendidikan untuk laki-laki maupun untuk perempuan.

Realisasi kebijakan perluasan dan kesempatan pendidikan, terutama yang berkaitan dengan aspek gender, dapat kita lihat pada data tahun 2003. Pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi, APK perempuan di SMA sudah mencapai 50,43% dan 51,74% untuk laki-laki. (Tabel 2.5), sedangkan APK pendidikan tinggi menjadi 10,14% untuk perempuan dan 11,75% untuk laki-laki. Dari aspek gender, walaupun APK laki-laki pada kedua jenjang pendidikan tersebut lebih tinggi dari pada APK perempuan, namun perbedaannya tidak terlalu besar. Hal yang kurang lebih sama juga terjadi pada angka APM, dimana bias gender tidak terlalu signifikan pada kedua jenjang pendidikan tersebut. Bias gender agak lebih tampak pada jenjang SMP, dimana baik APK maupun APM, perbedaan angkanya antara laki-laki dan perempuan lebih besar tetapi dalam kondisi yang lebih baik pada perempuan (selisih angka sekitar 2). Kesempatan untuk bersekolah ke SMP, dengan demikian lebih baik pada anak perempuan dari pada anak laki-laki.

Dampak krisis ekonomi dan moneter sudah mulai berkurang sehingga perluasan kesempatan pendidikan pada SMA dan MA sudah mulai meningkat dalam angka yang cukup berarti. Dampak krisis ekonomi dan moneter yang terus berkepanjangan, memang cukup berpengaruh kepada

meningkatnya angka dropped-out dan rendahnya angka melanjutkan, namun demikian, dengan berbagai upaya pemerintah serta bantuan luar negeri, secara keseluruhan krisis ekonomi tidak berdampak terlalu parah selain memperlambat pertumbuhan APK.

Tabel 2.5 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) berdasarkan Tingkat Pendidikan, 2003

No	Keterangan	Tingkat Pendidikan			
		SD	SMP	SMA	PT
1	Angka Partisipasi Kasar				
	Laki-laki	106,04	79,92	51,74	11,75
	Perempuan	105,59	82,37	50,43	10,14
2	Angka Partisipasi Murni				
	Laki-laki	92,49	62,60	40,48	8,78
	Perempuan	92,61	64,46	40,64	8,33

Sumber : Balitbang, Depdiknas

Pengaruh krisis ekonomi cukup terasa, karena pada saat krisis terjadi, penambahan jumlah penduduk terus meningkat, sehingga angka pembagiannya terus bertambah, padahal apabila dilihat angka absolutnya peningkatan jumlah siswa melanjutkan terus meningkat tidak mengalami penurunan akibat krisis. Hal yang paling masuk akal yang dipengaruhi oleh krisis ekonomi adalah pada saat angka lulusan bertambah terus, kurang dapat dibarengi dengan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan sehingga ledakan jumlah lulusan SD, banyak yang tidak tertampung di SL TP, lulusan SL TP banyak yang tidak tertampung di SL TA. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan memang terganggu oleh terjadinya krisis ekonomi karena nilai rupiah menjadi anjlok, dan daya beli menjadi masyarakat menjadi melemah, anggaran yang telah dialokasikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan menjadi tidak cukup, karena nilainya berubah.

Hampir sama dengan APK (Angka Partisipasi Kasar) untuk mengukur partisipasi penduduk dalam memanfaatkan fasilitas pendidikan formal persekolahan dapat digunakan APS (Angka Partisipasi Sekolah). APS atau

angka partisipasi sekolah, adalah data yang dikeluarkan oleh BPS untuk mengetahui jumlah penduduk menurut kelompok umur tertentu yang tertampung oleh lembaga pendidikan. Terdapat perbedaan dengan APM maupun APK, dimana APS tidak memperdulikan jenjang pendidikan tertentu, tetapi lebih mengarahkan kepada penduduk dalam kelompok usia tertentu dengan asumsi kelompok usia tadi berada pada jenjang pendidikan tertentu. Angka yang ditunjukkan oleh APS sedikit berbeda dengan angka APK dan APM, dan lebih cocok untuk mengetahui penduduk kelompok umur tertentu yang tertampung dalam dunia pendidikan.

Berdasarkan APS penduduk usia 7-12 tahun yang mengikuti pendidikan formal sebesar 96,42%, dan komposisi penduduk perempuan usia 7 -12 tahun yang bersekolah sedikit lebih besar yaitu 96,83%, dibanding laki-laki 96,04%. Apabila dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, penduduk daerah perkotaan memiliki APS yang lebih baik yaitu sebesar 97,75%, dengan komposisi 97,57% laki-laki dan 97,94% perempuan, sedangkan untuk daerah pedesaan sedikit lebih rendah yaitu sebesar 95,59% dengan komposisi 95,10% laki-laki dan 96,12% perempuan. Berdasarkan APS usia 7.12 tahun, menunjukkan bahwa partisipasi penduduk usia 7-12 tahun belum seluruhnya tertampung di lembaga pendidikan, atau masih terdapat peluang 3,58% penduduk usia 7 -12 tahun yang calon buta huruf. Namun demikian apabila dilihat dari segi kesetaraan gender, dengan komposisi tersebut, baik di perkotaan maupun di pedesaan telah menunjukkan kesetaraan gender, dimana persentasi penduduk usia 7 -12 tahun yang bersekolah hampir sama atau seimbang, antara laki-laki dan perempuan (Tabel 2.6)

Tabel 2.6 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 7-24 Tahun menurut Daerah tempat Tinggal, Jenis Kelamin, dan Kelompok Umur, 2003

Daerah/Jenis Kelamin	Kelompok Umur			
	7-12	13-15	16-18	19-24
Perkotaan				
Laki-laki	97.57	89.23	68.08	20.79
Perempuan	97.94	89.30	65.36	17.78
L + P	97.75	89.26	66.73	19.23
Perdesaan				
Laki-laki	95.10	74.83	38.99	5.34
Perempuan	96.12	76.49	38.89	4.10
L + P	95.59	75.62	38.94	4.71
Perkotaan + Perdesaan				
Laki-laki	96.04	80.48	51.27	12.72
Perempuan	96.83	81.58	50.65	10.75
L + P	96.42	81.01	50.97	11.71

APS penduduk usia 13-15 tahun sebesar 81,01 %, dengan komposisi 80,48% laki-laki dan 81,58% perempuan. Artinya terdapat sebesar 81,01 % penduduk usia 13-15 tahun yang bersekolah, dan sebesar 19,99% penduduk usia 13-15 tahun yang belum tertampung pada lembaga pendidikan formal (persekolahan), dengan kata lain masih diperlukan lembaga pendidikan formal untuk menampung 19,99% penduduk usia 13-15 tahun. Terdapat perbedaan yang cukup besar bila dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, dimana daerah perkotaan lebih maju atau APS usia 13-15 tahun sudah mencapai 89,26%, dengan komposisi untuk laki-laki lebih besar yaitu 89,23%, dan perempuan sebesar 89,30%. Sedangkan

untuk APS penduduk usia 13-15 tahun di daerah pedesaan masih jauh tertinggal yaitu hanya sebesar 75,62% dengan komposisi 74,83% laki-laki dan 76,49% perempuan. Dengan komposisi tersebut, dari sisi kesetaraan gender, berdasarkan APS penduduk usia 13-15 sudah dapat dipandang setara gender, dimana komposisi laki-laki dan perempuan sudah hampir seimbang.

Dalam kaitannya dengan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, APS usia 13-15 tahun menunjukkan bahwa keberhasilan wajar dikdas 9 tahun masih belum tuntas, atau masih sebesar 19,19% penduduk usia 13-15 tahun yang belum tertampung dalam lembaga pendidikan formal. Hal ini juga lebih banyak disebabkan karena kemampuan pemerintah untuk menyediakan fasilitas pendidikan jenjang SMP tidak seimbang dengan ledakan jumlah lulusan SD, akibatnya lulusan SD banyak yang tidak bisa melanjutkan ke SMP karena daya tampung SMP terbatas.

Angka partisipasi sekolah penduduk usia 16-18 tahun lebih kecil lagi, dibanding APS usia di bawahnya. Kondisi ini disebabkan oleh banyak hal, diantaranya kemampuan Sosial ekonomi orang tua yang belum seluruhnya mampu mengirim anaknya untuk sekolah sampai jenjang Sekolah Menengah, demikian juga daya tampung SM sangat terbatas, atau belum bisa menampung lulusan SMP, akibatnya lebih dari 45% penduduk usia 16-18 tahun tidak tertampung pada lembaga pendidikan formal. Sebagian penduduk usia 16-18 tahun yang berada di luar dunia pendidikan diantaranya sudah ada yang memasuki dunia kerja, tetapi belum ada angka kongkretnya.

APS penduduk usia 16-18 tahun sebesar 50,97%, dengan komposisi sebesar 51,27% untuk laki-laki dan sebesar 50,65% untuk perempuan. APS penduduk usia 16-18 tahun untuk daerah pedesaan masih sangat rendah yaitu sebesar 38,94% dengan komposisi 38,99% laki-laki dan 38,89% perempuan. Sedangkan untuk daerah perkotaan kondisinya

sedikit lebih baik yaitu sebesar 66,73% dengan komposisi 68,08% untuk laki-laki, dan 65,36% untuk perempuan. Apabila dilihat dari segi kesenjangan gender, maka komposisi untuk laki-laki dan perempuan menurut APS usia 16-18 tahun masih terdapat perbedaan antara pedesaan dan perkotaan, dimana kesenjangan gender justru lebih menonjol terjadi di perkotaan.

Apabila dilihat dari segi efisiensi, maka pendidikan untuk perempuan lebih efisien bila dibandingkan dengan laki-laki, terbukti dengan angka bertahan untuk perempuan lebih tinggi dari pada laki-laki pada semua jenjang pendidikan kecuali pada SMK (untuk keadaan tahun 2001/2002). Berdasarkan data angka bertahan pada tahun tersebut, terbukti bahwa perempuan yang masuk ke dalam sistem pendidikan lebih mampu bertahan menyelesaikan studinya sampai lulus, dibandingkan laki-laki, perempuan lebih mampu memenuhi segala tuntutan akademis yang dipersyaratkan untuk dapat lulus pada semua jenjang pendidikan. Hal lain yang mungkin lebih mampu dilewati oleh siswa perempuan adalah kecenderungan bahwa siswa perempuan lebih rajin dari siswa laki-laki sehingga ia bisa menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Setahun berikutnya keadaannya sedikit berubah, terutama terjadi pada jenjang SM/SMA/SMK, dimana angka bertahan laki-laki menjadi lebih besar dari pada angka bertahan perempuan.

Grafik 2.5 Angka Bertahan untuk Setiap Jenjang Pendidikan Berdasarkan Jenis Kelamin, 2002-2003

Angka bertahan untuk SD tahun 2002/2003 sebesar 83,60%, dengan komposisi angka bertahan perempuan untuk SD lebih tinggi yaitu 87,00% dibandingkan laki-laki sebesar 81,10%. Angka bertahan artinya apabila terdapat 100 orang siswa laki-laki yang masuk sekolah SD, terdapat 81 orang siswa yang bertahan sampai lulus, dan sisanya keluar dari sistem pendidikan atau mengulang kelas; untuk perempuan, bila terdapat 100 orang siswa perempuan masuk SD, maka akan terdapat 87 orang siswa yang bertahan sampai lulus: Angka bertahan SLTP ternyata lebih besar yaitu 90%, dengan komposisi 82,50% laki-laki dan 91,60% perempuan, sedangkan untuk SM sebesar 92,11 % dengan komposisi 93,10% laki-laki dan 91% perempuan. Angka bertahan SM terbagi atas angka bertahan SMU sebesar 93,50% dan SMK sebesar 90,10%, (Tabel 2.7). Untuk jenjang pendidikan SD dan SMP pada dua periode angka bertahan perempuan ternyata lebih tinggi dibandingkan laki-laki artinya tingkat efisiensi pendidikan perempuan lebih tinggi. Sedangkan pada tingkat SM angka bertahan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan.

Angka kelulusan tidak berbeda dengan angka bertahan dimana perempuan lebih mampu belajar di sekolah sampai lulus dibanding laki-laki. Angka kelulusan menunjukkan bahwa persentase siswa perempuan yang mengikuti ujian lebih besar yang berhasil lulus dibandingkan laki-laki, angka ini juga menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pendidikan untuk perempuan lebih tinggi. Pada tahun 2002 angka kelulusan tingkat SD-MI

sebesar 95,25% dengan komposisi perempuan yang lebih rendah yaitu 94,33%, sedangkan laki-Laki sebesar 96,14%, komposisi ini telah menunjukkan keseimbangan gender, demikian juga untuk MI angka kelulusan perempuan lebih kecil yaitu 97,99%, untuk laki-Laki dan 97,52% untuk perempuan, (Tabel 2.8). Angka kelulusan MI lebih tinggi (97,75%) bila dibanding dengan angka kelulusan SD yang tinggi yaitu 97,49%.

**Tabel 2.8 Angka Kelulusan Menurut Gender
Tahun 2002-2003**

Angka kelulusan untuk tingkat SMP dan MTs sebesar 96,50%, dengan komposisi angka kelulusan perempuan lebih rendah yaitu sebesar 95,45% sedangkan laki-laki sebesar 97,54%. Apabila angka kelulusan SMP dan MTs dipisah, maka dapat dilihat kecenderungan yang berbeda dimana angka kelulusan SMP menunjukkan komposisi perempuan yang lebih rendah yaitu 94,62% laki-laki dan 97,41 % perempuan, sedangkan angka kelulusan untuk MTs, laki-laki cenderung lebih rendah yaitu sebesar 98,09% laki-laki dan 98,77% perempuan.

Hal ini berbeda dengan angka kelulusan tingkat SM, perempuan lebih tinggi yaitu sebesar 97,33% sedangkan laki-laki sebesar 96,22%.

Perbedaan yang cukup besar pada angka kelulusan SMA, dimana laki-laki sebesar 94,67% sedangkan perempuan sebesar 97,45%. Angka kelulusan siswa perempuan di SMA lebih tinggi dari angka kelulusan perempuan di SMK (96,69%) dan di MA(98,41 %). Angka kelulusan pada jenjang Pendidikan Tinggi (PT) secara umum masih rendah yaitu 75,93%, bila dibanding angka kelulusan pada jenjang pendidikan yang lebih rendah umumnya di atas 90%, lebih rendah lagi angka kelulusan PT program Strata non-LPTK yaitu sebesar 68,09%, walaupun demikian angka kelulusan perempuan lebih rendah yaitu 71,04% dibanding laki-laki sebesar 77,92%.

Angka melanjutkan lulusan SD ke SMP, sebesar 72,41 % dengan komposisi yang masih cukup berimbang yaitu sebesar 73,06% laki-laki, dan 71,73% perempuan. Angka melanjutkan melanjutkan SMP ke SM sebesar 40,41 %, dengan komposisi yang makin besar kesenjangan menurut gender yaitu 41,32% laki-laki dan 39,45% perempuan. Terdapat kesenderungan yang berbeda pada angka melanjutkan SMP ke SMA dan ke SMK, dimana angka melanjutkan ke SMA komposisinya perempuan lebih tinggi (50,44% dan 46,42%), sedangkan angka melanjutkan SMP ke SMK komposisi perempuan lebih kecil (36,21 % dan 28,46%), (Tabel 2.9). Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin tinggi pula kesenjangan, dimana angka melanjutkan SM ke pendidikan tinggi (PT) kesenjangan semakin lebar yaitu 24,69% laki-laki dan 16,17% perempuan.

Tabel 2.9 Angka Melanjutkan untuk Setiap Jenjang Pendidikan Berdasarkan Jenis Kelamin 1002-2003

2. Gender Dalam Kurikulum dan Proses Pendidikan

Data dan informasi yang dikumpulkan melalui profil gender seperti ini sangatlah tidak memadai untuk dapat mengungkapkan kesenjangan gender secara menyeluruh yang terjadi dalam kurikulum dan proses pengelolaan pendidikan. Namun, dalam berbagai literatur telah banyak dibahas bagaimana peran-peran gender yang terjadi dalam proses pendidikan yang cenderung lebih bias laki-laki, dalam proses pembelajaran. Dalam studi ini kesenjangan gender yang terjadi dalam proses pengelolaan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dapat dilihat dari berbagai indikator, namun karena berbagai keterbatasan yang ada, studi ini hanya mengungkapkan beberapa gejala yang menarik dalam (1) gender dalam proses pengelolaan pendidikan, dan (2) isi kurikulum sekolah dan buku pelajaran.

1). Gender Dalam Proses Pengelolaan Pendidikan

Yang dimaksud dengan proses pengelolaan pendidikan adalah keseluruhan proses dan mekanisme pendayagunaan sumber daya pendidikan untuk mengatur jalannya sistem pendidikan nasional pada setiap bentuk kegiatan pengelolaan pendidikan dari mulai proses pengambilan keputusan, perencanaan, pengelolaan sampai dengan pelaksanaan operasional pendidikan. Setiap keputusan yang diambil oleh pimpinan, sejak tingkatan strategis sampai dengan tingkatan operasional, harus dijabarkan secara konsisten ke dalam langkah-langkah operasional pengelolaan, sehingga pelaksanaan pendidikan benar-benar mencerminkan tujuan kebijaksanaan. Oleh karena itu, kesenjangan gender yang terjadi dalam keseluruhan proses pengelolaan dan pelaksanaan setiap satuan pendidikan, akan sangat dipengaruhi oleh keputusan yang diambil oleh pimpinan. Jika bias gender terjadi pada suatu keputusan strategis yang dijadikan sebagai landasan operasional

pendidikan, maka akan mengakibatkan terjadinya bias gender yang semakin melebar, pada tingkatan operasional.

Dalam tingkatan yang paling strategis, kesenjangan dalam mekanisme pengelolaan pendidikan terletak pada partisipasi perempuan di dalam proses pengambilan keputusan, sejak tingkatan nasional, provinsi, kabupaten, sampai dengan satuan pendidikan di lapangan. Peran tradisional perempuan dalam keluarga yang terlanjur sudah dikonstruksikan dengan fungsi reproduktifnya, secara konsisten tercermin pula pada struktur jabatan struktural di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional menurut gender. Jumlah perempuan, secara keseluruhan, sampai saat ini baru dapat mengambil posisi yang sangat kecil dalam melaksanakan peran-peran mereka di dalam pengelolaan pendidikan nasional. Tabel 2.10 menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang menduduki jabatan struktural pada tahun 2003 masih sangat rendah, mulai dari Eselon I s/d Eselon V. Hal yang sama juga terjadi pada jabatan Fungsional Umum, dimana laki-laki sangat dominan dengan angka 70,5%. Dari kenyataan ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan di lingkungan lembaga-lembaga resmi pendidikan nasional masih sangat rendah, bahkan boleh dikatakan kurang berarti. Padahal jabatan struktural dalam lingkungan birokrasi pendidikan memegang kunci utama khususnya dalam melahirkan kebijaksanaan strategis yang dapat dijadikan landasan untuk mengarahkan berbagai kebijakan operasional pada tingkatan-tingkatan jabatan yang lebih rendah termasuk mereka yang beroperasi di lapangan. Tabel 2.10 juga menunjukkan, di samping kecil proporsinya, gejala lain menunjukkan bahwa semakin tinggi jabatan struktural, semakin kecil partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Proporsi perempuan yang hanya sebesar 21,50% yang menduduki jabatan eselon V, secara konsisten semakin mengecil proporsinya untuk posisi jabatan-

jabatan yang lebih tinggi hingga jabatan eselon I, yang hanya mencapai 8,50% saja. Gejala ini menunjukkan bahwa kesenjangan gender yang terjadi dalam sistem pengelolaan pendidikan di Indonesia sangatlah mendasar karena perempuan hanya menempati posisi sebagai penerima keputusan yang harus tunduk terhadap kebijaksanaan apapun yang ditentukan oleh para pejabat birokrasi, yang umumnya dikuasai oleh laki-laki. Keadaan ini akan semakin lebih diperparah lagi, jika perempuan yang proporsinya sangat kecil itu, juga belum memiliki wawasan gender seperti yang diharapkan.

Dalam birokrasi tingkatan menengah, para pejabat Eselon III dan IV perempuan yang berperan sebagai pemimpin pengelolaan pendidikan sehari-hari sejak tingkat pusat sampai dengan daerah menduduki posisi yang sangat kecil dan kurang menentukan. Proporsi perempuan yang menduduki jabatan struktural tingkatan ini masing-masing hanya 13,2% dan 21,6%, suatu jumlah yang sangat tidak rasional dalam kaitan dengan perimbangan kekuatan menurut gender dalam menggerakkan operasional pendidikan sehari-hari. Dapatlah disimpulkan bahwa mulai dari proses pengambilan keputusan tertinggi di lingkungan lembaga-lembaga pemerintah hingga para penentu kebijakan operasionalnya, kaum laki-laki masih memegang peran yang sangat dominant dibandingkan kaum perempuan, Kondisi ini akan mempertegas berbagai dugaan yang berkembang saat ini bahwa sangatlah wajar jika kesenjangan gender akan tetap bertahan sebagai permasalahan yang bersifat struktural.

**Grafik 2.6 Komposisi Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut
Jabatan Struktural dan Jenis Kelamin Tahun 2003**

SUMBER : Statistik Kepegawaian BKN 2004

Berdasarkan tabel di atas menggambarkan bahwa perjuangan kesetaraan gender masih panjang. Namun demikian, angka statistik BKN tersebut menunjukkan adanya peningkatan baik jumlah maupun persentase perempuan dalam jabatan struktural dibanding kondisi tahun 1998, dimana perempuan yang menduduki jabatan Eselon 1 sudah mencapai 7,72%, Eselon II sebesar 10,44% Eselon III sebesar 8,47%, Eselon IV sebesar 14,06% dan yang menduduki jabatan Eselon V sebesar 17,95%.

2) Kurikulum Sekolah dan Buku Pelajaran

Yang dimaksud dengan kurikulum sekolah adalah keseluruhan proses pembelajaran yang berlangsung di setiap satuan pendidikan, yang secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap intensitas siswa belajar dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan, atau dapat disingkat dengan istilah "proses pembelajaran". Kualitas dan kuantitas proses pembelajaran dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor anak, faktor fasilitas sekolah, guru, lingkungan belajar, dan muatan kurikulum yang termuat dalam buku pedoman kurikulum yang didistribusikan ke setiap satuan pendidikan. Namun di antara berbagai faktor tersebut, salah satu faktor penting artinya adalah isi kurikulum yang tertulis dalam bentuk tujuan-tujuan kurikuler, pokok-pokok bahasan serta isi atau materi dan contoh-contoh dalam buku pelajaran pada setiap mata pelajaran yang diberikan di sekolah.

Pengaruh isi kurikulum terhadap terjadinya kesenjangan gender dalam proses pendidikan di sekolah perlu diamati secara seksama karena apa yang berlangsung dalam proses pembelajaran sangat sulit digambarkan

dan dibuktikan dengan angka-angka. Namun demikian, terdapat beberapa indikator penting yang dapat dijadikan sebagai proksi dari permasalahan gender dalam proses tersebut. Di antara indikator yang sangat penting adalah proporsi perempuan yang berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum dan buku pelajaran.

Grafik 2.7 Komposisi Jumlah Pengembangan Kurikulum menurut Bidang Keilmuan dan Jenis Kelamin Tahun 2003

Sumber: Statistik Kepegawaian, BKN 2003

Salah satu faktor yang menyebabkan bias laki-laki dalam pendidikan adalah disebabkan karena laki-laki sangat dominan dalam mempengaruhi isi kurikulum. Isi kurikulum yang umumnya telah dituangkan dan dijabarkan ke dalam materi pelajaran yang ditulis pada buku-buku pelajaran itu merupakan faktor yang sangat kuat pengaruhnya terhadap terjadinya proses pembelajaran yang kurang tanggap gender. Para pengembang kurikulum dalam berbagai bidang studi umumnya didominasi oleh laki-laki, walaupun bukan kesengajaan, karena peran perempuan sebagai pengembang kurikulum sangat kecil, maka isi kurikulum cenderung disusun dari sudut pandang laki-laki. Komposisi perempuan yang berprofesi sebagai pengembang kurikulum sangat rendah, sehingga dimungkinkan bahwa segala kepentingan yang menyangkut perempuan kurang disuarakan.

Pada tahun 2003 terlihat bahwa peran perempuan rata-rata di berbagai bidang masih rendah dalam perannya mengembangkan kurikulum (secara keseluruhan angkanya juga masih rendah, yaitu 31,00%). Peran perempuan dalam pengembang kurikulum berdasarkan bidang keilmuan yang cukup menonjol adalah pada bidang ilmu keteknikan yaitu sebesar 40,00%. Hal ini cukup menarik mengingat bidang keteknikan biasanya secara tradisional menjadi domain kaum laki-laki. Peran perempuan sebagai pengembang kurikulum bila dilihat dari sisi kesenjangan gender memang masih jauh di bawah laki-laki, tetapi bila dilihat dari sisi perkembangannya sejak 5 tahun lalu, dapat dikatakan sudah mulai meningkat.

Para pemikir dan para ahli tersebut sebagian besar tergabung dalam jabatan-jabatan peneliti yang tugasnya membantu pemerintah untuk mengembangkan dan merevisi kurikulum sekolah serta memikirkan berbagai inovasi menyangkut proses pendidikan dan pendekatan pembelajaran pada setiap satuan pendidikan. Jika proporsi laki-laki yang menduduki jabatan fungsional peneliti itu sangat dominan, maka proses pendidikan dan pembelajaran yang bias laki-laki mungkin akan dapat terjadi, apalagi jika para pemikir tersebut belum memiliki wawasan gender seperti yang diharapkan.

Bias gender juga terjadi pada para penulis buku pelajaran yang umumnya laki-laki. Laki-laki ataupun perempuan yang terlahir dalam lingkungan Sosial budaya ketimuran yang telah dikonstruksikan dengan cara berfikir tradisional bahwa laki-laki berperan sebagai penopang ekonomi keluarga (*bread winner*) atau sebagai leader yang memegang peran utama dalam pengambilan keputusan keluarga, akan menganggap wajar jika buku-buku pelajaran itu memuat bahasan-bahasan yang bias gender.

Tidak semua mata pelajaran dapat memberikan pengaruh yang sama terhadap sensitivitas gender dalam proses pembelajaran. Namun buku-

buku pelajaran yang banyak membahas status perempuan dalam kehidupan masyarakat sudah tentu akan banyak memberikan pengaruh terhadap perlakuan perempuan dalam proses pengelolaan pendidikan dan pembelajaran. Mata-mata pelajaran tersebut diantaranya: Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN), Pendidikan Jasmani, Bahasa, kesenian dan sejenisnya.

Namun demikian, jika kita ingin merubah isi buku pelajaran agar menjadi lebih sensitif gender, tidaklah cukup dengan hanya menambah atau merekrut para penulis perempuan. Perempuan, seperti halnya laki-laki, juga dapat menjadi sumber kesenjangan gender, karena perempuan juga terlahir dalam lingkungan dan cara berfikir tradisional yang sama. Jika latar belakang Sosial budaya dan cara berpikir tradisional antara laki-laki dan perempuan itu tidak berbeda, maka buku-buku pelajaran yang ditulis oleh para penulis buku perempuan juga tidak terhindar dari permasalahan yang bias gender, apalagi jika para penulis buku pelajaran itu sebagian besar adalah laki-laki.

Grafik 2.8 Penulis Buku Pelajaran Sekolah Dasar (SD) menurut Jenis Kelamin dan Bidang 5tudi Tahun 2003

Para penulis buku pelajaran, berdasarkan data buku yang dijual pada Toko Buku Gramedia, pada tahun 2003, menunjukkan bahwa penulis buku pada setiap jenjang pendidikan sebagian besar adalah penulis laki-laki. Para penulis buku pelajaran perempuan itu rata-rata masih sangat rendah baik pada tingkat SD, SLTP, maupun sekolah menengah. Penulis perempuan yang relatif agak menonjol adalah Bahasa Asing SD (42,6%), IPA SD (38,28%), Bahasa Asing SMP (44,68%), Bahasa Indonesia SM (39,13%). Data ini, walaupun hanya sebagai kasus, namun diperkirakan akan menggambarkan keadaan keseluruhannya karena penerbit dan toko buku ini termasuk salah satu yang terbesar dan terpopuler. Gejala ini menunjukkan bahwa substansi kurikulum yang dibelajarkan di sekolah yang cenderung akan bias gender menjadi sulit untuk dihindarkan.

Grafik 2.9 Penulis Buku Pelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP) menurut Jenis Kelamin dan Bidang Studi Tahun 2003

Ketimpangan gender pada penulis buku pelajaran terjadi secara merata pada jenjang pendidikan SD, SL TP, dan SM. Ketimpangan tersebut makin besar pada jenjang pendidikan yang makin tinggi (untuk penulis laki-laki SD 77,36%, SMP 79,14%, dan SM 82,71%).

Grafik 2.10 Penulis Buku Pelajaran Sekolah Menengah (SM) menurut Jenis Kelamin dan Bidang Studi Tahun 2003

Jika sebagian besar buku pelajaran penulisnya adalah laki-laki, maka tidaklah mengherankan jika substansi pelajaran yang disajikan dalam buku-buku tersebut juga cenderung bias laki-laki, karena wacana dan wawasan yang berkembang lebih banyak dipengaruhi oleh wawasan dan pengalaman empirik dari sudut pandang laki-laki. Di samping telah dipengaruhi oleh cara berfikir tradisional yang menempatkan laki-laki dalam kedudukan lebih penting dalam keluarga dan masyarakat, laki-laki yang menulis buku-buku pelajaran tersebut tidak memiliki kepentingan yang sama dengan perempuan untuk memperjuangkan kesetaraan status perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.

Kesenjangan gender dalam proses pembelajaran di sekolah dapat juga dilihat dari beberapa indikator arus peserta didik (*student Flow*) yang dapat memperlihatkan bagaimana murid bergerak dari satu tingkatan ke tingkatan lain, atau satu jenjang ke jenjang pendidikan lain. Arus peserta didik

merupakan indikator yang menunjukkan seberapa efisienkah proses pelaksanaan dan pengelolaan itu berlangsung, dan selanjutnya dapat dilihat adakah kesenjangan gender di dalam pergerakan tersebut.

3. Program Penjurusan dan Program Studi

Terjadinya ketimpangan menurut gender juga tercermin dalam proporsi jumlah peserta didik yang tidak seimbang menurut jurusan-jurusan atau program studi yang ada pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Adanya asumsi perbedaan kemampuan intelektual, fisik dan keterampilan antara laki-laki dan perempuan telah memperkuat bias gender tersebut. Laki-laki diasumsikan lebih kuat fisiknya, lebih mampu berpikir logis dan lebih sesuai untuk belajar pada bidang-bidang gains dan teknik yang sering juga disebut dengan ilmu-ilmu keras (*hard Sciences*). Sebagian besar siswa atau mahasiswa yang terdaftar di bidang-bidang keteknikan adalah laki-laki karena kurikulum sekolah atau pendidikan tinggi ini dianggap kurang sesuai dengan perempuan.

Sebaliknya perempuan dianggap lebih lemah dan mudah dipengaruhi oleh perasaan. Konsekuensinya lebih banyak perempuan memilih belajar ilmu sosial atau ilmu-ilmu yang sangat berkaitan dengan peran perempuan dalam keluarga. Sebagai contoh, lebih banyak perempuan belajar tentang perawat karena bidang ini dianggap berhubungan erat dengan karier Sosial perempuan yang feminin. Perempuan juga lebih dianggap cocok dengan karakteristik keperempuanannya jika mereka dipersiapkan untuk bekerja atau meniti karier pada bidang-bidang yang berkaitan dengan kerumahtanggaan seperti memasak, menata busana, atau kecantikan.

Di dunia bisnis, potensi para pekerja perempuan sering tidak didayagunakan secara optimal sejalan dengan keahlian atau kemampuan bisnis yang mungkin dimiliki oleh mereka. Dalam dunia pemasaran atau manajemen bisnis, misalnya, pekerja perempuan sering tidak difungsikan dalam melaksanakan peran-peran bisnis secara profesional, dalam pengertian jabatan yang lebih tinggi atau jabatan pengambil keputusan. Tetapi mereka digunakan sebagai

tenaga yang lebih menonjolkan daya tariknya secara fisik, seperti tenaga pelaksana pemasaran *sales promotion girl* (SPG), pramugari, pramuniaga, dsb. Dalam keadaan demikian, pekerja perempuan tidak secara langsung berperan sebagai tenaga produktif tetapi hanya sebagai penunjang atau pembantu tenaga-tenaga profesional yang sebagian besar diperankan oleh laki-laki, sehingga potensi perempuan sebagai pekerja produktif belum didayagunakan seoptimal mungkin.

Kalaupun memang ada, peran profesional perempuan sering hanya digambarkan dalam peran stereotipe pada bidang-bidang pekerjaan tertentu yang umumnya kurang diminati oleh pekerja laki-laki, atau mereka mungkin lebih berfungsi sebagai tenaga pendukung daripada sebagai pemeran utama atau penanggungjawab. Efek stereotipe ini cenderung telah memperkuat ketidakseimbangan gender yang secara historis terus berjalan dan melembaga sehingga seolah-olah menjadi kebenaran yang diyakini masyarakat secara umum. Hal ini mengakibatkan rendahnya harapan-harapan (***expectation***) perempuan yang mungkin ada sepanjang hidup dan karirnya. Efek stereotipe ini telah merugikan perempuan dan anak gadis dalam memerankan fungsi mereka atas dasar kekuatan dan kemampuannya sendiri yang sebenarnya dapat menantang mereka untuk mengembangkan seluruh potensinya secara optimal. Gejala stereotipe ini pada dasarnya merupakan efek diskriminasi terhadap perempuan yang terjadi sepanjang hayat sejak mereka berada di lingkungan keluarga, di bangku sekolah sampai dengan dunia kerja. Beberapa bentuk stereotipe ini sangat kuat dan melembaga dan sering sangat sukar untuk dideteksi.

Bias gender pada profesi pekerjaan tersebut sudah dimulai sejak para siswa /mahasiswa menempuh belajar di sekolah /perguruan tinggi dalam pengelompokan jurusan dan program studi. Ini merupakan bagian dari gejala ketidakseimbangan gender dalam sistem pendidikan, yang dapat diamati melalui jumlah dan komposisi jumlah siswa atau mahasiswa menurut

jurusan-jurusan atau program studi pada pendidikan menengah dan tinggi. Ketidakeimbangan dalam proporsi menurut jurusan atau program studi ini tidaklah sederhana, karena menyangkut berbagai faktor penyebab yang cukup kompleks. Salah satu penyebabnya adalah faktor Sosial-budaya yang dianut oleh keluarga peserta didik yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan, tentang jurusan atau program studi yang akan dipilih oleh anak-anak laki-laki atau anak perempuan mereka. Faktor lainnya adalah sistem seleksi masuk ke setiap jenis pendidikan. Murid-murid perempuan yang sudah terlanjur "termarginalkan" dalam proses pendidikan pada tingkat sekolah, cenderung relatif lebih sulit untuk memilih jurusan-jurusan tertentu daripada lawan jenisnya di Perguruan Tinggi.

1) Penjurusan pada Pendidikan Menengah

Dalam sistem pendidikan nasional berdasarkan UUSPN No. 2/89, penjurusan dimulai pada pendidikan menengah, yaitu di SMK dan SMU. Pada SMK penjurusan dilakukan menurut sejumlah besar program-program studi yang tergabung dalam 7 program studi kejuruan, yaitu Pertanian dan Kehutanan; Teknologi dan Industri; Bisnis dan Manajemen; Kesejahteraan Masyarakat; Pariwisata; dan Seni dan Kerajinan, dan Teknologi Kerumahtanggaan. Keenam program studi tersebut masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Dalam penjurusan tersebut sementara ini mengandung diskriminasi gender atau memiliki kesenjangan gender tertentu.

Pada SMU penjurusan itu dimulai pada tahun ketiga, yang meliputi tiga jurusan yaitu jurusan Bahasa dan Sastra, Ilmu-Ilmu Sosial, serta IPA dan Matematika. SMU adalah program pendidikan umum yang dapat menyiapkan lulusan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, sesuai dengan jurusan atau program keahlian tertentu. Dengan demikian, kesenjangan menurut gender dalam penjurusan di SMU memiliki andil yang sangat besar dalam memperkecil atau bahkan mungkin memperlebar kesenjangan pendidikan

menurut gender dalam jurusan-jurusan keahlian di perguruan tinggi, dan bahkan lebih lanjut terjadinya insiden diskriminasi gender dalam dunia kerja. Berdasarkan Tabel 2.15 menunjukkan bahwa siswa perempuan kurang berminat untuk memilih program studi yang dianggap lebih cocok untuk laki-laki, sehingga siswa perempuan SMK yang memilih program studi Pertanian dan Kehutanan pada tahun 2002/2003 sebesar 12,9%, Teknologi dan Industri sebesar 1,0%, siswa perempuan yang memilih program studi Bisnis dan Manajemen sebesar 64,9%, Pariwisata sebesar 94,0%, Seni dan Kerajinan sebesar 52,9%. Program studi di SMK yang mulai menunjukkan kesetaraan gender adalah program studi pekerjaan Sosial yang biasanya didominasi oleh perempuan, sekarang mulai seimbang yaitu 58,2% laki-laki dan 41,8% perempuan.

Data-data tersebut menunjukkan sebagian gejala yang diperkirakan dalam beberapa postulat di atas, terutama adalah gejala diskriminasi dalam bentuk stereotipe program keahlian atau jurusan. Laki-laki ternyata memang sangat dominan dalam mempelajari ilmu-ilmu kejuruan yang berkaitan dengan sektor-sektor ekonomi industri seperti pertanian, kehutanan, dan teknologi. Sedangkan perempuan lebih dominan bersekolah pada jenis-jenis SMK yang mendalami kejuruan yang selama ini dianggap lebih sesuai untuk perempuan, seperti Seni dan Kerajinan, Kepariwisata, serta Bisnis dan Manajemen. Proporsi ini merupakan salah satu gejala yang memperkuat mitos yang telah berkembang dalam masyarakat dalam waktu lama bahwa fungsi laki-laki sebagai penopang ekonomi keluarga (*bread winner*), sedangkan perempuan memerankan fungsinya domestik yang menunjang produktivitas laki-laki, khususnya dalam peran-peran rumah tangga.

**Tabel 2.15 Pemisahan Gender Menurut Program Studi di SMK Dan
Jenis Kelamin Tahun 2002-2003**

No.	Program Studi	2000/2001			2001/2002			2002/2003		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
		%	%		%	%		%	%	
1	- Pertanian & Kehut.	70,8	29,2	44,455	85,8	14,2	44,455	87,1	12,9	44,455
2	- Teknoloai dan industri	96,0	4,0	807,271	98,8	1,2	807,271	99,0	1,0	807,271
3	- Bisnis dan Manajemen	28,3	71,7	938076	31,3	68,7	938076	35,1	64,9	938076
4	- Kesej. Masyarakat	52,2	47,8	12,123	57,2	42,8	12,123	58,2	41,8	12,123
5	- Pariwisata	6,7	93,3	106,374	6,5	93,5	106,374	6,0	94,0	106,374
6	- Seni dan Kerajinan	47,1	52,9	25,638	51,9	48,1	25,638	47,1	52,9	25,638

Sumber: Balitbang, Depdiknas

Jika laki-laki lebih dominan dalam mempelajari kemampuan atau keterampilan teknis pada cabang-cabang kejuruan di bidang teknologi tertentu, maka laki-laki lebih mempersiapkan diri untuk dapat bekerja secara profesional di bidang keterampilan kejuruan tersebut. Dari ilmu kejuruan yang dipelajarinya itu, laki-laki seolah-olah secara khusus dipersiapkan untuk menjadi pemain utama dalam dunia karier dan profesional. Sementara itu perempuan seolah-olah dipersiapkan hanya untuk melaksanakan peran pembantu, misalnya yang berkaitan dengan bidang bisnis dan manajemen. Dominasi laki-laki dalam bidang-bidang tersebut akan membawa perkembangan karir mereka pada posisi puncak atau strategis baik di bidang produksi maupun pemasaran. Banyaknya perempuan yang mengambil kejuruan bisnis dan manajemen ini merupakan gejala yang menunjukkan seolah-olah perempuan hanya dipersiapkan untuk menjadi peran pembantu tenaga profesional, khususnya bidang pemasaran, klerikal, humas, administrasi, yang justru lebih banyak menonjolkan daya tariknya secara fisik ketimbang kemampuannya secara

profesional.

Sudah sejak lama terdapat gejala bahwa komposisi siswa perempuan dalam jurusan-jurusan di SMA, menunjukkan kecenderungan laki-laki lebih dominan pada jurusan-jurusan IPA dan Matematika, sedangkan perempuan lebih dominan pada jurusan Bahasa dan Ilmu-ilmu Sosial atau ilmu perilaku. Kemampuan perempuan yang lebih tinggi di bidang bahasa dan sastra, selain menunjukkan kekuatan perempuan dari segi ketekunan, dan kerapuhan, sekaligus menunjukkan gejala diskriminasi yang amat mendalam. Gejala ini dikhawatirkan akan menjadi faktor penghambat bagi perempuan untuk memilih jurusan IPA dan Matematika sehingga mengurangi kemungkinan bagi mereka untuk belajar lebih lanjut dalam bidang keahlian ilmu-ilmu dasar (seperti fisika, Biologi, Kimia) serta ilmu teknologi di perguruan tinggi, karena ilmu-ilmu dasar atau ilmu keteknikan itu adalah landasan untuk mereka dapat bekerja secara profesional dan menduduki posisi strategis dalam berbagai bidang keahlian di dunia kerja nanti.

Dalam perkembangannya, sampai tahun 2002/2003, sudah terjadi pergeseran struktur pemilihan jurusan di SMA, hampir semua jurusan memiliki keseimbangan yang cukup signifikan (Grafik 2.11 dan Tabel 2.16/Lampiran). Kondisi kesenjangan gender dalam penjurusan di SMA yang sudah terjadi sejak lama, sudah mulai diperbaiki. Masalah siswa SMA yang mendominasi pada jurusan Ilmu-IPS dan Bahasa dan sastra, lebih disebabkan karena siswa yang perempuan lebih banyak jumlahnya dibanding siswa laki-laki.

Grafik 2.11 Proposal Siswa Menurut Gender dan Jurusan di SMA Tahun
2002/2003

2. Jurusan dan Program Studi di Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi merupakan pendidikan terminal yang secara langsung didesain untuk menyiapkan pekerja dalam meniti karier sepanjang hayat bagi sebagian besar lulusannya. Bagi sebagian besar lulusan, perguruan tinggi adalah kesempatan belajar yang paling akhir yang mereka terima. Hal ini terutama terjadi di negara-negara berkembang di mana sebagian besar lulusannya tidak belajar lebih lanjut baik melalui pendidikan formal, kursus-kursus atau belajar secara mandiri. Oleh karena itu keahlian yang diperoleh di pendidikan tinggi sangat memberikan pengaruh terhadap karier dan produktivitas lulusan sepanjang hayat. Jika demikian, maka memilih jurusan keahlian di perguruan tinggi merupakan salah satu keputusan terpenting bagi semua orang yang dapat mempengaruhi arah karier serta kehidupannya kelak. Hal ini berarti bahwa sekali seseorang mengambil keputusan untuk memilih jurusan keahlian tertentu di perguruan tinggi, maka dia telah menetapkan garis hidup yang akan dijalani sepanjang hidup dan kariernya. Namun, keputusan yang diambil oleh peserta didik atau keluarganya itu tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan rasional, tetapi dipengaruhi pula oleh nilai-nilai Sosial-budaya masyarakat yang sudah melembaga dalam waktu yang lama, termasuk mengenai peran-peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan Grafik 2.12 dan Tabel 2.17/Lampiran, tidak ada satupun jurusan-jurusan keahlian di perguruan tinggi yang didominasi oleh mahasiswa perempuan, kecuali pada jurusan keahlian di bidang pendidikan, yaitu Pendidikan IPS (54,16%). Proporsi jumlah perempuan yang memilih semua

jurusan/keahlian di perguruan tinggi non-keguruan bahkan semuanya di bawah proporsi mahasiswa laki-laki. Lebih dominan lagi pada jurusan teknologi baik pada perguruan tinggi non-kependidikan maupun pada perguruan tinggi kependidikan, semuanya didominasi oleh laki-laki (78,65% dan 72,50%). Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki masih sangat mendominasi jenis-jenis keahlian yang ada di perguruan tinggi, atau dengan kata lain kesenjangan kesempatan pendidikan tinggi masih umumnya dikuasai laki-laki. Kesenjangan ini umumnya disebabkan oleh jurusan-jurusan yang sulit (seperti IPA dan Matematika) di SMA yang masih sebagian besar didominasi oleh laki-laki. Walaupun sekarang pada penjurusan di SMU sudah mulai menunjukkan adanya kesetaraan gender khususnya untuk jurusan Ilmu-IPA, tetapi di perguruan tinggi pada jurusan teknologi masih didominasi oleh laki-laki. Artinya, kesetaraan gender baru sampai pada penjurusan di SMA, yang mudah-mudahan akan terus sampai pada jurusan-jurusan di perguruan tinggi.

Yang cukup menarik adalah jika kita membandingkan antara proporsi perempuan dalam jurusan bisnis dan manajemen di SMK dan perguruan tinggi. Proporsi perempuan yang sangat dominan dalam kejuruan bisnis dan manajemen di SMK (64,9%) itu kurang dominan pada jurusan-jurusan keahlian ekonomi dan bisnis di perguruan tinggi (46,25%). Gejala ini semakin memperkuat dugaan bahwa tenaga kerja perempuan masih sangat dominan dalam memerankan fungsi pendukung di dunia bisnis dan manajemen (seperti pemasaran, klerikal, humas, administrasi, dan SPG) yang lebih menonjolkan daya tarik perempuan secara fisik ketimbang menonjolkan kemampuan intelektualnya.

Grafik 2.12 Pemisahan Gender menurut Program Studi Program Pendidikan Tinggi Tahun Ajaran 2002/2003

Pada jurusan-jurusan keahlian teknologi di perguruan tinggi nonkependidikan, proporsi mahasiswa perempuan masih menduduki seperlima (21,35%) dari jumlah seluruh mahasiswa pada jurusan-jurusan keahlian bidang ini. Gejala ini memperkuat penafsiran yang selama ini dipercaya kebenarannya bahwa keahlian bidang ilmu-ilmu keras seperti ilmu-ilmu keteknikan lebih dianggap cocok untuk laki-laki dan kurang cocok untuk perempuan karena karakteristik perempuan yang feminin dan lebih mudah dipengaruhi perasaan atau jiwa sosial. Stereotip ini tercipta bukan karena kebijakan pendidikan dari pemerintah, tetapi lebih ditentukan oleh cara berfikir tradisional yang dianut pada sebagian besar masyarakat Indonesia bahwa perempuan lebih diarahkan untuk memerankan fungsi domestik untuk mengurus keluarga dan anak-anak sedangkan laki-laki memerankan fungsi publik sebagai penopang kehidupan ekonomi keluarga.

Pada program profesi keguruan juga terjadi gejala serupa, yaitu bahwa perempuan lebih dominan dalam memilih jurusan keguruan IPS sedangkan laki-laki lebih ke keguruan IPA dan Teknologi. Perguruan tinggi keguruan menyiapkan mahasiswa sebagai guru-guru pendidikan dasar dan menengah. Gejala ini masih sejalan dengan dugaan-dugaan yang sementara ini berkembang dalam masyarakat bahwa bidang IPA dan Teknologi cenderung dianggap sebagai bidangnya laki-laki (pendidikan IPA 50,89% dan Teknologi 72,50%), dan bidang IPS adalah bidangnya kaum perempuan (pendidikan IPS

54,16%).

Upaya untuk meningkatkan proporsi perempuan agar mencapai kesetaraan gender dalam memilih jurusan-jurusan keahlian di perguruan tinggi, belumlah cukup untuk dapat mendorong agar perempuan memilih jurusan-jurusan "ilmu keras", misalnya melalui kebijakan beasiswa atau kemudahan seleksi untuk mahasiswi. Upaya ini cenderung memiliki keterbatasan. Peningkatan proporsi perempuan pada jurusan-jurusan keahlian "ilmu keras" selama ini masih harus melalui perjuangan yang panjang, walaupun calon mahasiswa perempuan tamatan SMU yang memilih jurusan-jurusan IPA dan Matematika sudah menunjukkan kesetaraan gender. Oleh karena itu diperlukan upaya yang lebih berjangka panjang melalui upaya-upaya pembinaan kesetaraan gender sejak pendidikan dasar sampai dengan pemilihan jurusan di SMU, SMK dan perguruan tinggi sehingga pada gilirannya akan dapat mendorong terjadinya kesetaraan gender dalam jurusan-jurusan keahlian di perguruan tinggi, sampai mencapai kesetaraan keahlian dalam dunia kerja.

Kesetaraan gender merupakan indikator terukur dari pembangunan pendidikan yang berkeadilan gender. Berdasarkan konsep ini kesetaraan gender tidak seyogyanya diartikan bahwa perempuan berjuang untuk menjadi pesaing bagi laki-laki dalam pengelolaan dan pembangunan pendidikan, melainkan harus dianggap sebagai mitra sejajar.

C. Tujuan dan Hasil-hasi yang Diharapkan dari Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan

Sasaran operasional pembangunan pemberdayaan perempuan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan adalah :

- 1) Teridentifikasinya pasal-pasal yang bias gender dalam peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.

- 2) Tersusunnya usulan revisi peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan yang masih bias gender.
- 3) Tersusunnya usulan revisi perundang-undangan baru untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan.
- 4) Ditetapkan dan dilaksanakannya Peraturan Presiden tentang penghapusan buta huruf perempuan di daerah.
- 5) Ditetapkan dan dilaksanakannya Peraturan Presiden tentang peningkatan kesertaan perempuan dalam program pendidikan non formal.
- 6) Ditetapkan dan dilaksanakannya kebijakan dan strategi peningkatan penguasaan iptek oleh perempuan.

Atas dasar itu, maka tujuan umum pengarusutamaan gender dalam bidang pendidikan adalah mengupayakan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai komponen sistem pendidikan nasional melalui penetapan kebijakan, perluasan pemahaman, dan rencana aksi nasional bidang pendidikan yang berwawasan gender.

Sementara secara khusus, tujuan pengarusutamaan gender dalam bidang pendidikan ini adalah

- 1) Membentuk mekanisme untuk formulasi kebijakan dan program yang responsif gender dalam bidang pendidikan.
- 2) Memberikan perhatian khusus pada kelompok-kelompok yang mengalami marjinalisasi sebagai dampak dari bias gender dalam bidang pendidikan.
- 3) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran semua pihak baik pemerintah maupun non pemerintah sehingga mau melakukan tindakan yang sensitif gender di bidang pendidikan.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, hasil-hasil yang ingin dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang dikoordinasikan oleh kelompok kerja adalah

- a) Ditetapkannya kebijakan Depdiknas, termasuk kebijakan Mendiknas dan unit-unit utama serta unit-unit kerja terkait dalam peningkatan kesetaraan dan keadilan gender bidang pendidikan. Pengembangan kebijakan pendidikan yang berwawasan gender itu diharapkan didukung oleh hasil-hasil penelitian dan analisis kebijakan, baik secara makro nasional, provinsi, maupun penelitian terhadap permasalahan gender prioritas tinggi.
- b) Terumuskannya kebijakan operasional pada tingkat unit utama dan unit kerja terkait serta dinas-dinas pendidikan tingkat propinsi sebagai dasar untuk perumusan berbagai rencana aksi nasional yang mengarah pada terwujudnya kesetaraan dan keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan menurut jenis kelamin. Rencana keijakan operasional di masing-masing unit utama (termasuk pada dinas-dinas penddikan propinsi) akan menjadi landasan kuat bagi terwujudnya program-program operasional dalam rangka pengarusutamaan gender sesuai dengan bidang kerja dan daerah msing-masing.
- c) Tersusunnya rancangan Rencana Pembangunan Pendidikan Tahunan tingkat Nasional yang memuat program-program pembangunan pendidikan, seperti membenahan kurikulum, pengumpulan data statistik dan indikator, penyesuaian muatan buku bahan ajar, serta pengembangan pendekatan pembelajaran yang berwawasan gender. Program-program pembangunan pendidikan yang termuat dalam Repetanas tersebut akan menjadi patokan bagi pelaksanaan pembangunan pendidikan pada masing-masing unit kerja serta menjadi patokan penyusunan Repetada baik pada tingkat propinsi maupun kabupaten/kota.
- d) Terwujudnya komitmen para pengambil keputusan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional melalui berbagai bentuk advokasi, sosialisasi, dan perluasan pemahaman mengenai pendidikan berwawasan gender serta terbentuknya kesadaran gender di lingkungan para pejabat pendidikan nasional di tingkat pusat, propinsi, dan kabupaten/kota, serta

para pelaksana teknis kependidikan melalui program sosialisasi mengenai kebijakan pendidikan berwawasan gender. Kesadaran gender juga diharapkan tumbuh dan berkembang pada berbagai segmen masyarakat agar dapat memberikan dukungan terhadap program pemerintah dalam pengarusutamaan gender.

- e) Terselenggaranya model-model pendidikan yang berwawasan kesetaraan gender pada setiap satuan pendidikan, baik sekolah, pendidikan masyarakat, maupun pendidikan keluarga.

D.Kegiatan-Kegiatan Pokok Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan

Kegiatan pokok dalam rangka pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender bidang pendidikan meliputi *capacity building*, kerjasama dengan Pusat-Pusat Studi Wanita, penyusunan profil pendidikan, analisis bahan ajar, kampanye kesetaraan gender, komunikasi-informasi-edukasi, koordinasi, dan monitoring-evaluasi.

Capacity Building

Pengembangan kapasitas kelembagaan tidak saja dilakukan di pusat, melainkan juga di daerah-daerah, sehingga terbangun proses perluasan pemahaman pada para pengambil keputusan di daerah tentang pentingnya keadilan dan kesetaraan gender dalam bidang pendidikan. Pengembangan institusi di pusat dan di daerah dilakukan melalui pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka pendalaman pemahaman pendidikan berwawasan gender kepada para pejabat pendidikan eselon I hingga eselon IV untuk mencapai kesamaan persepsi, tumbuhnya komitmen, dan tersusunnya

program serta rencana aksi pengarusutamaan gender dalam bidang pendidikan.

Kerjasama dengan Pusat-Pusat Studi Wanita (PSW)

Kerjasama dilakukan dalam rangka kegiatan studi mengenai kesenjangan gender dalam bidang pendidikan. Pada tahun 2002 telah dilakukan kerjasama dengan sembilan Pusat Studi Wanita di tujuh Propinsi. Pada tahun 2003 hasil studi ditindaklanjuti dengan melakukan pendalaman penelitian gender dalam bidang pendidikan pada empat Pusat Studi Wanita terbaik. Pada tahun 2003 ini pula, studi mengenai kesenjangan gender dalam bidang pendidikan diperluas dengan melibatkan lima belas PSW pada lima belas propinsi. Titik berat studi diletakkan pada penelitian mengenai kebijakan pendidikan melalui pendekatan dan analisis kebijakan makro pada tingkat propinsi. Analisis kebijakan makro ini menggunakan model Gender Analysis Pathways (GAP) dan Policy Outlook and Plan of Action (POP) sebagai model analisis kebijakan yang telah dikembangkan secara nasional oleh Bappenas pada beberapa sektor seperti pendidikan, ketenagakerjaan, koperasi, hukum, dan pertanian.

Penyusunan Profil Pendidikan dan Pengembangan Database Pendidikan yang Berwawasan Gender

Penyusunan profil pendidikan diarahkan pada penggambaran mengenai karakteristi penjurusan dan program studi pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan yang dijabarkan menurut jenis kelamin. Kegiatan perluasannya adalah pengembangan database pendidikan menurut jenis kelamin guna menghasilkan data statistik dan indikator pendidikan yang lebih berwawasan gender. Sistem pendataan statistik dan indikator pendidikan ini diharapkan dapat digunakan untuk memonitor setiap titik waktu secara teratur

perkembangan kesetaraan gender bidang pendidikan. sistem pendataan statistik dan indikator pendidikan yang berwawasan gender ini harus dikembangkan secara terintegrasi mulai dari tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi, sampai tingkat pusat, dan dilakukan melalui kerjasama dengan Balitbang Depdiknas dan Biro Pusat Statistik.

Analisis Bahan Ajar

Pada tahun 2002 analisis bahan ajar lebih ditekankan pada analisis buku-buku mata pelajaran Bahasa Indonesia, PPKn, dan IPS untuk SD. Kegiatan menghasilkan temuan-temuan penting berupa adanya bias gender dalam muatan buku-buku pelajaran, baik dalam isi maupun ilustrasinya. Tahun 2003 analisis bahan ajar dilanjutkan dengan perluasan dan pendalaman. Dalam aspek perluasan, kegiatan dilanjutkan dengan menganalisis bahan ajar pada mata pelajaran dan jenjang pendidikan lain, termasuk modul-modul pada pendidikan luar sekolah. Dalam aspek pendalaman, kegiatan ditekankan pada tindak lanjut dari hasil-hasil analisis bahan ajar, yaitu mengembangkan acuan standar penulisan buku pelajaran yang berwawasan gender bagi para penulis, ilustrator, dan penerbit.

Kampanye Kesetaraan Gender

Kampanye kesetaraan dan keadilan gender dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat pemerhati masalah perempuan. Kegiatan kampanye antara lain didisi dengan uji-coba model pendidikan keluarga berwawasan gender dan model pendidikan keluarga bagi perempuan marginal perdesaan dan perkotaan. Kegiatan uji-coba ini dilakukan dengan menyajikan beberapa pesan standar dalam program pendidikan keluarga sebagai bagian dari kampanye kesetaraan gender, yakni HAM, demokrasi, gender dalam pendidikan, dan life skills, yang ditujukan secara

langsung (direct Campaign) kepada keluarga di 30 daerah yang ditunjuk. Kegiatan kampanye ini terus diperluas dan diperdalam dari tahun ke tahun.

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi

Kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) lebih merupakan kegiatan sosialisasi dan dilakukan melalui media massa atau media lain yang relevan untuk dapat menjangkau masyarakat luas. Pada tahap awal kegiatan ini terbatas pada kegiatan talkshow pengarusutamaan gender di media massa elektronik dan pembuatan film mengenai kesetaraan dan keadilan gender dalam pendidikan. Selanjutnya kegiatan KIE ini diperluas dengan kegiatan pemilihan artikel dalam media cetak mengenai gender dalam pendidikan, dan pembuatan iklan layanan masyarakat mengenai gender dalam pendidikan di media televisi. Untuk kepentingan KIE ini disusun pula advocacy kit.

Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui sampai sejauhmana kegiatan yang dilaksanakan berjalan dan dapat memberikan dampak positif ke arah terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender pada berbagai dimensi pendidikan. Kegiatan dilakukan dengan menyiapkan mekanisme pengumpulan data, pengembangan database, analisis data, pemantauan keterlaksanaan kegiatan, dan evaluasi kegiatan.

E. Model Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender